

ABSTRAK

Analisis Yuridis Pembelian Barang Melalui *E-Commerce* Yang Tidak Sesuai Pesanan

Oleh : Imam Hanafi

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping : Imam Rofiqi, S.H., M.Kn.

Kegiatan perdagangan di masyarakat telah berkembang sangat pesat. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya dengan berkembangnya teknologi yang berbasis internet yang dikenal dengan nama e-commerce. E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemu penjual dan pembeli, media yang dipergunakan internet. Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan jasa tetapi di sisi lain pelanggaran hak – hak konsumen sangat risikan terjadi karena karakteristik e-commerce yang khas. Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi ecommerce.

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang barangnya tidak sesuai dengan pesanan dan Bagaimana Pertanggungjawaban hukum bagi penjual *E-commerce*, apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan deskripsi toko. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya.

Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dengan Undang – undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang – undang ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi e-commerce. Serta pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada.

Keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah negara Republik Indonesia. Dan keterbatasan akan hak – hak konsumen yang diatur dalam UUPK. Kedua perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur meliputi perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, dari sisi konsumen, dari sisi produk, dari sisi transaksi. Ketiga permasalahan permasalahan yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen terdapat 2 (dua) permasalahan yaitu pertama permasalahan yuridis, meliputi keabsahan perjanjian menurut KUHPerdata.

Kata kunci : Jual Beli, E-commerce. Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

Juridical Analysis of Purchases of Goods Through E-Commerce that are not in Order

By : Imam Hanafi

Main Advisor : Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H.

Supervising Lecturer : Imam Rofiqi, S.H., M.Kn.

Trading activities in the community have grown very rapidly. This is influenced by the development of internet-based technology known as e-commerce. E-commerce is a form of trade that has its own characteristics, namely trade that crosses national borders, does not meet sellers and buyers, the media used by the internet. Violation of consumer rights is very risky because of the unique characteristics of e-commerce. Therefore, legal protection for consumers is very much needed in e-commerce transactions.

As for the formulation of the problem in writing this thesis, how is legal protection for consumers whose goods are not in accordance with the order and how is legal responsibility for e-commerce sellers, if the goods ordered do not match the store description. The purpose of writing this thesis is to get a solution from the formulation of the problem.

The research method in writing this thesis is normative by using a statutory approach with several sources of primary and secondary legal materials, as well as tracing legal materials through legislation and other literature.

Legal protection for consumers is regulated by Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This law is expected to guarantee legal certainty for consumers in e-commerce transactions. As well as the accountability of business actors to consumers must be fulfilled in accordance with existing rules and regulations.

Limited understanding of business actors who are only specifically located in the territory of the Republic of Indonesia. And the limitations of consumer rights regulated in UUPK. Second, legal protection for consumers that should be regulated includes legal protection from the side of business actors, from the consumer side, from the product side, and from the transaction side. The three problems that arise in the legal protection of consumers there are 2 (two) problems, namely the first juridical problem, including the validity of the agreement according to the Civil Code.

Keywords : Buying and Selling, E-commerce. Consumer protection.